

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dalam kesimpulannya, partisipasi merupakan suatu turut berperannya masyarakat dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, dan berperan serta. Kendati dalam tulisan ini penulis membahaskan partisipasi masyarakat dalam hal politik, namun sejatinya partisipasi masyarakat tidak hanya bicara soal partisipasi politik, bisa partisipasi dalam hal pembangunan, baik makro ataupun mikro, dan lain-lain. Lebih lanjut, partisipasi politik yang baik dari masyarakat menunjukkan salah satu indikasi bahwa negara tersebut telah menjalankan demokrasi serta sistem pemerintahannya dengan baik. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga perhitungan suara. Tindakan pengawasan masyarakat juga tidak terbatas pada pemantauan tetapi juga mendapatkan akses terhadap informasi yang memang berhak untuk diketahui publik.

Selain itu, dalam tahapan-tahapan pilkada yang dilaksanakan di Kota Depok pada tahun 2019, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Depok pada umumnya bersifat pasif. Bawaslu mengatakan bahwa pasifnya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak terlepas dari hambatan yang ada, yaitu: kondisi pandemi yang melanda dunia pada saat itu. Masyarakat pada umumnya cenderung hanya memikirkan dirinya sendiri ketimbang memikirkan terkait Pilkada. Namun, bukan berarti dengan anggapan seperti ini masyarakat tidak melakukan partisipasi secara total. Sebagai contoh dalam tahapan perencanaan program dan anggaran.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan kepala daerah dengan beberapa cara, yaitu: *pertama*, melakukan pengawalan terhadap produk kebijakan serta penganggaran yang dikeluarkan oleh pejabat terkait. Hal ini dikonfirmasi oleh narasumber yang penulis wawancarai, ia mengatakan bahwa

Rendi Muhammad, 2022

Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu: Studi Kasus Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kota Depok Tahun 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) [www.repository.ac.id](http://www.repository.ac.id) ]

dalam tahap ini, teman-teman mahasiswa serta dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan pengawalan terhadap produk kebijakan yang dikeluarkan. Selain itu, menurut penulis, dalam tahapan ini, pengawalan serta partisipasi yang dilakukan merupakan partisipasi yang paling fundamental. Dalam artian dalam tahapan inilah semua kebijakan program akan ditentukan, berapa besaran anggaran dan lain-lain. *Kedua*, tahapan perencanaan program dan anggaran, partisipasi masyarakat tercermin dalam munculnya lembaga swadaya masyarakat yang berfokus dalam menyorot permasalahan terkait dengan kepemiluan, khususnya menyorot terkait dengan pengawasan pemilu, salah satunya adalah Komite Independen Sadar Pemilu (KISP). *Ketiga*, yakni tahapan penyerahan daftar penduduk potensial, partisipasi politik dari masyarakat dilakukan dengan begitu pasif. Selain karena faktor pandemik yang penulis katakan di muka, hal ini disebabkan juga karena dalam tahapan ini merupakan tahap yang kurang dengan pengawasan partisipasi dari masyarakat. Begitupun dengan tahapan pemutakhiran data pemilih. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat cukup pasif. Masyarakat dihimbau untuk melakukan pengecekan kembali atas data pemilih yang ada. Hal ini dimaksudkan agar data pemilih yang terdaftar selalu akurat.

Dalam tahap pemilihan selanjutnya, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak terlalu banyak dan cenderung pasif. Adapun partisipasi yang cukup aktif ada dalam tahap Kampanye. Pada saat kampanye, partisipasi masyarakat cukup aktif dengan semua corak yang ada. Ada yang melakukan partisipasi secara normatif, adapula yang melakukan partisipasi secara massif. Selain itu penting bagi pemerintah untuk memfasilitasi setiap kegiatan pemilihan kepala daerah dengan mengikutsertakan masyarakat. Pemerintah harus membuka akses dalam menyebarkan informasi secara transparan terhadap tahapan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, sinergi antara masyarakat, LSM, dan pemerintah dapat menciptakan keadaan pemilihan yang memuat dan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi.

Rendi Muhammad, 2022

Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu: Studi Kasus Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kota Depok Tahun 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) [www.repository.ac.id](http://www.repository.ac.id) ]

## 5.2 Saran

Dalam hal ini, penulis menyarankan kepada pejabat terkait khususnya Bawaslu untuk melakukan evaluasi kembali terhadap program-program yang dilaksanakan. Terlebih terhadap program yang menstimulus masyarakat untuk melakukan partisipasi. Program tersebut harus dilaksanakan dengan *output* yang harus jelas dan nyata. Hal ini dimaksudkan agar program yang dijalankan dapat benar-benar menstimulus masyarakat untuk melakukan partisipasi politiknya dengan baik. Selain itu, penulis juga merekomendasikan kepada KISP untuk membuat kanal informasi baik di media sosial maupun webiste yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Kanal informasi tersebut dapat dimuat konten yang bertujuan untuk memberi pendidikan pemilihan kepala daerah atau secara umum pendidikan politik. KISP dalam mengunggah konten dalam bentuk inforgrafis, e-book, video, dan artikel. Kemudian, penulis juga merekomendasikan kepada generasi muda untuk terlibat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah khususnya di Kota Depok dan umumnya di Indonesia yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan media komunikasi berbasis internet untuk dimanfaatkan sebagai media pelaporan dan pengawasan cukup efektif. Hal tersebut disebabkan arus informasi yang cepat serta tidak terbatas pada waktu dan tempat.

Rendi Muhammad, 2022

Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu: Studi Kasus Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kota Depok Tahun 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) [www.repository.ac.id](http://www.repository.ac.id) ]